

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 1991, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Maramis, Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara.
- Muladi, dan Dwidja Priyatno, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Edisi Kedua*, PT Eresco, Bandung.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2017, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya (Edisi Kedua)*, Kencana, Depok.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Suartha, I Dewa Made, 2015, *Hukum Pidana Korporasi*, Setara Press, Malang.

Suratman dan H. Philips Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, UMM Press, Malang.

Wiyanto, Roni, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung.

B. Artikel Jurnal

Hariman Satria, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam*, *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, Volume 28, Nomor 2, Juni 2016.

Muhammad Fatahillah Akbar, *Koherensi Pengaturan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing di Indonesia*, *Jurnal RechtsVinding*, Volume 8, Nomor 2, Agustus 2019.

Oksimana Darmawan, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Illegal Fishing di Indonesia*, *Jurnal Yudisial*, Volume 11, Nomor 2, Agustus 2018.

Siti Hapsah Isfardiyana, *Business Judgement Rule oleh Direksi Perseroan*, *Jurnal Panorama Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2017.

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Anjani, Dian, 2006, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perikanan*, Tesis, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

D, Aryanvi Kantha, 2008, *Pelaksanaan Peneggelaman Kapal Pelaku Tindak Pidana di Bidang Perikanan Berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap Oleh Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Ambon*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Mawitjere, Pricillia S., 2016, *Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perikanan di Provinsi Sulawesi Utara*, Tesis, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.



D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3299).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4433).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5073).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058).

Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman
Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/Permen-KP/2015
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 56/Permen-KP/2014 tentang Penghentian Sementara
(*Moratorium*) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/Permen-KP/2017
tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan
Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal
Fishing*).

*International Plan of Action to Prevent, Deter dan Eliminate Illegal,
Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU).*



E. Internet

- Kkp, 2019, “KKP Bersama Instansi Terkiat Proses 33 Kasus Destructive Fishing”, <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/11060-kkp-bersama-instansi-terkait-proses-33-kasus-destructive-fishing>, diakses pada tanggal 9 September 2019.
- Maradong, David Setia, 2016, “Potensi Besar Perikanan Tangkap Indonesia”, <https://setkab.go.id/potensi-besar-perikanan-tangkap-indonesia>, diakses pada tanggal 19 September 2019.
- Maronie, Sherief, “Telaah Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia”, [http://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/djpdspkp/Penegakan%20Hukum%20TPP%20di%20Wilayah%20ZEEI%20\(11%20Mei%202018\).pdf](http://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/djpdspkp/Penegakan%20Hukum%20TPP%20di%20Wilayah%20ZEEI%20(11%20Mei%202018).pdf), diakses pada tanggal 14 september 2019 pukul 17.00 WIB.
- Pregiwati, Lilly Aprilya, 2018, “Hingga November 2018, Pemerintah Tangani 134 Kasus Illegal Fishing”, <https://kkp.go.id/artikel/7551-hingga-november-2018-pemerintah-tangani-134-kasus-illegal-fishing>, diakses pada tanggal 5 april 2019.
- Roza, Elviana, 2017, “Maritim Indonesia, Kemewahan Yang Luar Biasa”, <https://kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa>, diakses pada tanggal 5 april 2019.
- Rusmana, 2005, “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Perikanan”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12231/pertanggungjawaban-korporasi-dalam-tindak-pidana-perikanan>, diakses pada tanggal 5 april 2019.
- Simorangkir, Eduardo, 2017, “Ini Tantangan Pemerintah Berantas Kejahatan Perikanan di RI”, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3764866/ini-tantangan-pemerintah-berantas-kejahatan-perikanan-di-ri>, diakses pada tanggal 18 april 2019.
- Sutari, Tiara, 2017, “Menteri Susi: Kejahatan Perikanan Mirip Terorisme”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170406002402-20-205289/menteri-susi-kejahatan-perikanan-mirip-terorisme>, diakses pada tanggal 5 april 2019.